

PENGARUH SEKTE ISLAM SUNNI TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK DI LEBANON

Abdullah Syakir

UIN Sunan Ampel Surabaya
abdullahsyakir57@gmail.com

Sukarma

UIN Sunan Ampel Surabaya
fahmy_abdoeh@yahoo.co.id

Abstract: This article focuses on the history of Islamic sects in Lebanon particularly Sunni Islam and its influence to political development in the country. The thesis was examined by using Gabriel Almond's Civic Culture Theory. The results of this study concluded that (1) Lebanon is a multi-ethnic and multi-religious country with a confessional system. Namely, the division of power based on a particular religion; (2) The most influential Islamic sects in Lebanon are Sunni, Syi'ah, and Druze; (3) Sunni Islam are divided into several variants. Each variant of this sect competes for influence in Lebanese politics. However, their different paths aimed toward one goal. That is, wanting the establishment of Islamic society according to the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet.

Keywords: *Lebanon, Sunni, Islamic sects, political influence*

PENDAHULUAN

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel dan Palestina di selatan dengan luas wilayah 10,452 ribu kilometer persegi (Hamamy dkk, 2012: 3). Menurut Badan Administrasi dan Statistik Lebanon tahun 2012, negara Lebanon berpenduduk 3,8 juta jiwa, 96% penduduk Lebanon asli sedangkan 4% warga pendatang (Yacoub & Badre, 2012: 3). Penduduk Lebanon terbagi dalam beberapa kelompok agama, di antaranya Sunni, Syiah, Druze, Maronit, dan lainnya. Sejak akhir abad kesebelas, kelompok-kelompok ini menguasai beberapa wilayah di Lebanon. Maronit menempati bagian utara, yaitu, Jubayl, Batrun, dan Baharri. Lebanon selatan dikuasai oleh kelompok Syiah dan Druze. Syiah juga berada di perbatasan Palestina-Lebanon yang sekarang dikuasai Israel (Sihbudi, 2011: 24). Sedangkan Sunni terfokus di daerah Tripoli wilayah terbesar kedua setelah Beirut.

Lebanon memakai sistem politik parlementer demokratik yaitu suatu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Negara dengan menganut sistem demokrasi yang demikian merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dimana seorang

Perdana menteri dan jajaran menteri dalam kabinetnya akan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer posisi kepala negara akan ditempati oleh seorang Presiden. Uniknya, di Lebanon ada perjanjian yang tidak tertulis yakni Pakta Nasional 1943 yang melambangkan politik konfesional pasca kemerdekaan yang menjadi dasar pendirian Lebanon sebagai negara multi-keyakinan. Pakta ini lahir sebagai hasil negosiasi antar-pemimpin aliran Sunni, Syiah, dan Maronit pada musim panas 1943 sehingga memungkinkan Lebanon untuk merdeka. Poin utama dalam pakta nasional ini mengenai pembagian kekuasaan antar sekte yang mendominasi, presiden harus dari Maronit, perdana menteri dari Sunni, dan ketua parlemen dari Syiah. Kursi parlemen dibagi di antara sekte Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5 sampai tahun 1989, kemudian secara merata pada tahun-tahun berikutnya (Gambill, 2007: 38). Pembagian kekuasaan diatas berdasarkan sensus penduduk tahun 1932 (Khalil, 1998: 8).

Lebanon sebagai negara yang dibangun dengan pelbagai macam sekte tentu akan menimbulkan gesekan antara sekte-sekte tersebut dalam memperebutkan atau mempertahankan kepentingan politik mereka. Pakta Nasional 1943 nyatanya tidak bisa menyelamatkan pertikaian antar sekte pada tahun 1958 dan kemudian di tahun 1970an (Khazen (al), 1991: 39). Konflik antar sekte juga dipengaruhi hubungan internasional negara Lebanon, intervensi negara luar yang memiliki hubungan atau bekerja sama dengan sekte-sekte terkait kian memperparah atau meredakan konflik itu sendiri. Intervensi Amerika, Suriah, Iran, pendudukan Israel atas Lebanon, dan perlawanan PLO mempengaruhi kondisi kestabilan negara Lebanon (Laffin, 1985: 7-8). Selain politik sektarian yang terpecah begitu banyak di Lebanon, juga berkembang politik yang berideologi Komunis Sosialis, Kapitalis Leberalis dan Sekuler dibuktikan dengan berdirinya banyak partai yang berlatar ideologi tersebut.

Ditengah paham sektarian yang menjadi akar masalah di Lebanon tentunya tidak lepas dari peran serta pemeluk agama Islam. Di Lebanon, Islam sendiri terbagi dalam tiga kelompok yang menonjol, yakni Sunni, Syiah, dan Druze. Masing-masing kelompok ini memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan politik di negara ini. Kaum Sunni, misalnya, tampaknya berpihak pada gerakan perlawanan Palestina melawan pasukan Amal Syiah dalam pertempuran di kamp pada bulan Mei-Juni 1985. Bangkitnya dua sekte Syiah dan Druze, merupakan tantangan baru dan tak terduga bagi

komunitas Sunni yang merupakan sekte Islam utama dalam Pakta Nasional tahun 1943. Kesepakatan Maronite-Sunni, yang menetapkan kerangka kerja resmi untuk distribusi kekuasaan politik setelah kemerdekaan, hampir mengabaikan Komunitas Syiah, yang belakangan kemudian menjadi sekte yang paling eksplosif dan radikal. Langkah militer oleh orang-orang Syiah digunakan untuk melenyapkan semua milisi bersenjata Sunni, jelas mencerminkan kebencian yang mendalam bahwa kaum Syiah selalu mengungkapkan kepada kaum Sunni atas peran mereka di Lebanon sebelum perang. Tidak akan ada lagi kaum Sunni yang mewakili Muslim Lebanon (Khalil, 1985: 29-30).

Kelompok Islam yang ada di Libanon ada tiga. Sunni, Syiah dan Druze (sekte Alawi termasuk varian dari Syiah). Kelompok Islam yang pertama sekte Sunni menjadi Islam mayoritas yang ada di Lebanon. Mayoritas tinggal di tiga kota besar, yaitu di Beirut, Tripoli, dan Sidon. Sebagian kecil hidup di wilayah kecil seperti Bekaa, Akkar, Shuf, dan di daerah bagian selatan. Sekte Sunni tampaknya memiliki kecenderungan partikular kedaerahan lebih besar ketimbang sekte lainnya, setidaknya semenjak pakta nasional 1943 sampai perang saudara 1970an. Apa yang ada dari organisasi politik Sunni terbatas pada masing-masing distrik, kota, bahkan seringkali sampai satu desa (lingkungan). Dengan demikian, tidak mungkin untuk memeriksa kepemimpinan politik Sunni tanpa memperkenalkan beberapa perbedaan geografis (Khalil, 1985: 35).

Kelompok Islam yang kedua yakni Syiah sebagai sekte terbesar kedua menurut sensus penduduk tahun 1932. Berbeda dengan sekte Sunni. Syiah lebih solid dan revolusioner. Kelompok ini mendiami hampir merata diseluruh kota yang ada di Lebanon. Mereka ditemukan dalam konsentrasi besar di Bekaa. di Selatan tepatnya di Jabal 'Amil, beberapa komunitas di jubayl, di Beirut dan sekitarnya. Komponen Syiah ini, bagaimanapun, telah mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk pada waktu yang berbeda, karena sekte Syiah telah terbukti secara khusus dinamis dan revolusioner. Pemberontakan Syiah pertama kali disembunyikan di balik slogan-slogan yang pernah menarik perhatian Lebanon ideologi kiri dan pro Palestina. Baru sekarang komponen Syiah mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa harus bersembunyi dibalik topeng, Arabisme.

Perlawanan Syiah melawan Israel menghapus kompleks inferioritas yang selalu menekan keterpisahan budaya dan politik mereka. Posisi baru Syiah, dan terutama perang sekte Syiah melawan orang-orang Palestina di kamp-kamp Beirut, telah

mengungkapkan kurangnya kesetiaan mereka terhadap Arabisme dan kepalsuan komitmen mereka terhadap pembebasan Palestina. Yang perlu digarisbawahi bahwa sekte Syiah bergerak secara revolusioner mencari perubahan radikal dalam sistem politik dan ekonomi Lebanon. Namun, mereka tetap mempertahankan ikatan dan nilai sosial yang sangat konservatif yang mencerminkan diri mereka dalam tindakan politik dan organisasi, dan juga dalam interaksi social (Khalil, 1985: 43-44).

Dan kelompok Islam yang ketiga adalah Sekte Druze. Sekte Druze tinggal di Shuf, 'Alay, Suq al-Gharb, selatan Bekaa, dan Hasbayya. Meskipun populasinya tidak banyak sekitar 7 persen dari penduduk Negara Lebanon, Druze memiliki peranan penting dalam sejarah Lebanon dan politik kontemporer. sebuah peran yang telah melampaui jumlah populasi dari berbagai kelompok yang ada di Lebanon. Druze memerintah pegunungan Lebanon bersama dengan orang-orang Maronit sebelum terbentuknya Lebanon modern. Masyarakat Druze telah mempertahankan keterpisahan budayanya dengan dunia luar. Pada tahun 1031, komunitas Druze tertutup untuk orang luar. Ajaran Druzisme selalu menjadi rahasia, terkadang tidak diungkapkan kepada anggotanya sendiri (Khalil, 1985: 31).

Dalam ajaran Druze yang jadi perbedaan utama antara Druze dan Muslim lainnya adalah bahwa Druze percaya pada reinkarnasi, tidak percaya pada karakter wajib dari shalat setiap tahun, menolak haji ke Mekah, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Perbedaan keagamaan ini membuat Druze bertabrakan dengan sebagian besar komunitas dan ajaran dalam Islam itu sendiri (Arfii, 2005: 187).

Pengaruh gerakan kelompok Sunni dalam perpolitikan di Lebanon semenjak Pakta Nasional 1943 sampai sekarang cukup diperhitungkan oleh lawan politik mereka. Baik dari kalangan kelompok Syiah, Druze ataupun sekte lainnya. Yang menarik bagi penulis seperti apa yang diungkapkan diatas, sekte Sunni cukup terikat dengan partikular kedaerahan. Karakteristik Sunni di Lebanon berbeda-beda tiap kelompok. Ada kelompok yang bergerak dibidang politik, mengisi kursi-kursi parlemen. Ada juga kelompok yang bergerak menggunakan doktrin agama serta kelompok terakhir bergerak dengan ideologi jihad. Mereka mempunyai karakteristik tersendiri di negara ini sehingga perlu untuk diulas lebih mendalam.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Politik Libanon

Lebanon adalah republik parlemen demokratis dengan kerangka konfesionalisme, salah satu bentuk konsosiasionalisme yang merupakan pembagian kekuasaan, tetapi di Lebanon berdasarkan agama tertentu. Konstitusi memberikan rakyat hak untuk mengubah pemerintah mereka. Namun, dari pertengahan 1970-an sampai pemilihan parlemen tahun 1992, perang saudara menghalangi pelaksanaan hak-hak politik tersebut. Menurut konstitusi, pemilu untuk parlemen harus diadakan setiap 4 tahun. Pemilihan parlemen terakhir diadakan pada tahun 2009. Parlemen kemudian akan memilih Presiden setiap 6 tahun untuk satu periode. Presiden tidak dapat mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya. Pemilihan presiden terakhir diadakan pada tahun 2008. Presiden dan parlemen memilih Perdana Menteri. Partai politik dapat dibentuk; sebagian besar berdasarkan pada kepentingan sektarian. Tahun 2008 menjadi sebuah perubahan signifikan pada konstelasi politik Lebanon ketika Perjanjian Doha memperbolehkan oposisi menggunakan hak veto pada Dewan Menteri Lebanon dan meneguhkan konfesionalisme sebagai sarana pembagian kekuasaan (Khalil, 1998: 31-32).

Sejak munculnya negara setelah kehancuran Kesultanan Utsmaniyah, kebijakan nasional sebagian besar ditentukan oleh kelompok tradisional daerah dan pemimpin sektarian. Pakta Nasional 1943, kesepakatan tidak tertulis yang berisi dasar politik Lebanon modern, mengatur kekuasaan politik dengan sistem konfesional berdasarkan sensus tahun 1932. Kursi di parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5, sampai tahun 1990 ketika rasio berubah menjadi 1:1. Pakta ini juga membagi jabatan di pemerintahan sesuai dengan agama, dengan tiga pejabat tertinggi: presiden dari Kristen Maronit, ketua parlemen dari Islam Syi'ah, dan perdana menteri dari Islam Sunni.

Usaha untuk menggantikan atau menghapuskan sistem konfesional mengenai pembagian kekuasaan telah menjadi perdebatan di Lebanon selama beberapa dekade. Beberapa kelompok agama yang diuntungkan dengan formula tahun 1943 memilih untuk mempertahankannya, sementara yang dirugikan menginginkan untuk diubah sesuai dengan data demografi terbaru atau dihapuskan sepenuhnya. Walau demikian, poin-poin yang terdapat pada Pakta Nasional dikodifikasikan pada Perjanjian Ta'if 1989, meneguhkan sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon.

Meskipun kekuasaan presiden telah berkurang pada Perjanjian Ta'if, Konstitusi

tetap memberikan Presiden kewenangan yang kuat. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, untuk mengeluarkan peraturan tambahan mengenai pelaksanaan undang-undang, dan untuk meratifikasi perjanjian (Khalil, 1998: 35-36).

Anggota parlemen dipilih oleh seluruh warga berusia tidak kurang dari 21 tahun. Berdasarkan sistem mayoritas untuk berbagai kelompok konfesional. Terdapat upaya untuk mengubah sistem menjadi perwakilan proporsional yang lebih dapat akurat untuk memberikan perwakilan kelompok politik dan lebih memungkinkan untuk kelompok minoritas didengar. Sebagian besar anggota parlemen tidak mewakili partai politik seperti di negara Barat, dan jarang membentuk blok politik ala Barat di Parlemen. Blok politik biasanya didasarkan pada kepentingan agama dan daerah dan bukan pada ideologi politik.

Parlemen memainkan peran penting dalam urusan keuangan, karena memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pajak dan mengesahkan anggaran. Parlemen juga memiliki kontrol politik atas kabinet melalui pertanyaan formal kepada menteri mengenai masalah kebijakan. Sistem peradilan Lebanon didasarkan pada Undang-undang Napoleon. Sistem peradilan Lebanon memiliki tiga tingkat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan kasasi. Ada juga sistem pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas status pribadi, misalnya, aturan tentang hal-hal seperti pernikahan, perceraian dan warisan (Khazen (el), 1991: 87).

Lembaga politik Lebanon sering memainkan peran sekunder yang didasarkan kepentingan golongan tertentu terutama agama. Keluarga berpengaruh juga memainkan peran dalam memobilisasi suara bagi pemilihan parlemen. Meskipun demikian, sejumlah partai politik, ada di Lebanon, bahkan lahir sebelum kemerdekaan. Partai terbesar umumnya berideologi agama. Gerakan Patriotik Kebebasan, Partai Kataeb, juga dikenal sebagai Partai Falangis, Blok Nasional, Partai Liberal Nasional, Pasukan Lebanon, dan Pengawal Cedar (sekarang dilarang) merupakan partai dengan basis massa Kristen. Amal dan Hizbullah adalah partai dengan agama Syi'ah, dan PSP (Partai Sosialis Progresif) adalah partai Druze utama. Ketika Partai Syiah dan Druze sama-sama mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya, partai Kristen mengalami perpecahan di antara faksi. Partai Sunni belum dapat menjadi kendaraan politik bagi calon, dan cenderung untuk fokus untuk masalah di Lebanon mengenai

Sunni pada umumnya. Partai Sunni di Lebanon antara lain Hizbut Tahrir, Gerakan Masa Depan, Organisasi Nasseris Independen, Al-Tauhid, dan Ahbash. Selain partai domestik, ada cabang partai sekuler pan-Arab (Partai Ba'ath, sosialis, dan komunis) yang aktif pada tahun 1960-an dan selama perang saudara.

Ada perbedaan di antara masing-masing Partai Muslim dan Kristen mengenai peran agama dalam negara. Terdapat pula aktivisme politik yang sangat tinggi di antara para pemimpin agama di seluruh spektrum sektarian. Aksi saling mempengaruhi untuk jabatan dan kekuasaan di antara agama, partai politik, dan pemimpin partai dan kelompok membuat politik di Lebanon sangat rumit (Khazen (el), 1991: 89-90).

Di masa lalu, sistem ini mampu menghasilkan demokrasi yang baik. Namun, dengan perubahan keseimbangan demografi Muslim-Kristen-Druze mengakibatkan segregasi yang lebih menyeluruh pada seluruh spektrum sosial. Interaksi antarsektarian sangat kurang baik itu partai politik, tempat tinggal, sekolah, media, bahkan tempat kerja. Semua faksi telah menyerukan reformasi sistem politik.

Beberapa orang Kristen mendukung desentralisasi politik dan administratif dari pemerintah, dengan bagian Muslim dan Kristen bekerja secara berpisah di dalam kerangka sebuah konfederasi. Sebagian besar umat Islam lebih memilih pemerintahan pusat yang bersatu dengan pembagian kekuasaan yang sesuai dengan populasi. Dinamika reformasi Perjanjian Ta'if telah sampai pada usulan ini, tetapi belum sepenuhnya terwujud.

Pengungsi Palestina, yang umumnya beragama Islam Sunni dan berjumlah antara 160.000-225.000, tidak terlalu aktif dalam panggung politik Lebanon (Arfi, 2005: 37).

Pada 3 September 2004, Parlemen Lebanon memutuskan untuk mengamendemen konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan Presiden Émile Lahoud yang seharusnya enam tahun (dan akan berakhir) ditambah tiga tahun lagi. Langkah itu didukung oleh Suriah, yang mempunyai banyak personel militer di Lebanon.

Setelah penarikan pasukan Suriah pada April 2005, Lebanon menggelar pemilihan parlemen dalam empat putaran, dari 29 Mei-19 Juni. Pemilu ini adalah pertama kalinya dalam 33 tahun yang diadakan tanpa adanya militer Suriah. Pemilu ini dimenangkan oleh Aliansi Empat Partai, koalisi dari beberapa partai dan organisasi-

organisasi baru yang menentang dominasi Suriah di politik Lebanon (Arfi, 2005: 39).

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan republik parlemen demokratis Lebanon terbagi dalam 3 cabang lembaga kekuasaan, yaitu:

1. Eksekutif

Presiden dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali lagi sampai enam tahun sejak akhir masa jabatan pertama. Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Parlemen; Presiden diharuskan untuk beragama Maronit, Perdana Menteri Sunni, dan Ketua Parlemen Syiah.

Sistem konfesional ini berdasarkan pada data sensus 1932 yang menunjukkan Kristen Maronit menjadi agama mayoritas. Pemerintah Lebanon terus menolak untuk melakukan sensus baru (Khazen (el), 1991: 112).

2. Legislatif

Lembaga legislatif Lebanon disebut Majelis Perwakilan (Majlis al-Nuwab dalam bahasa Arab). Sejak pemilu tahun 1992 (pertama sejak reformasi Perjanjian Ta'if 1989 dengan jumlah kursi sama antara Kristen dan Islam), Parlemen mempunyai 128 anggota. Masa jabatan anggota parlemen empat tahun, tetapi baru-baru ini telah diperpanjang sampai lima tahun.

Kursi di Parlemen didistribusikan berdasarkan agama tetapi dipilih secara langsung dengan hak pilih universal. Masing-masing agama memiliki jatah kursi di Parlemen. Mereka tidak hanya mewakili warga yang seagama, tetapi, semua calon di suatu daerah pemilihan, terlepas dari afiliasi agama, harus menerima jumlah suara yang cukup, termasuk pengikut dari semua agama. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kompetisi antarsektarian dan memaksimalkan kerjasama antaragama: calon hanya akan berhadapan dengan yang seagama, tetapi harus mencari dukungan dari luar agamanya untuk terpilih.

Partai oposisi, Perkumpulan Qornet Shehwan, sebuah kelompok yang menentang pemerintahan pro-Suriah, terdahulu, mengklaim bahwa daerah pemilihan yang dibuat memungkinkan Muslim Syiah dipilih dari daerah pemilihan mayoritas Syi'ah (di mana Hizbullah berkuasa), sedangkan banyak Kristen ditempatkan di daerah pemilihan mayoritas Muslim, memaksa para

calon dari Kristen untuk mewakili kepentingan Muslim. (Tuduhan serupa, tetapi sebaliknya, terjadi pada pemerintahan Chamoun di tahun 1950-an).

3. Yudikatif

Lebanon adalah negara dengan hukum sipil. Untuk cabang yudikatif terdiri dari:

a. Pengadilan Biasa:

- 1) Pengadilan Kasasi
- 2) Pengadilan Banding (di pusat ke gubernuran)
- 3) Pengadilan tingkat Pertama

b. Pengadilan Khusus:

- 1) Dewan Konstitusional untuk membahas konstitusionalitas undang-undang
- 2) Dewan Tertinggi mendengar tuduhan terhadap presiden dan perdana menteri jika perlu.

Sistem pengadilan militer yang juga memiliki yurisdiksi atas warga sipil untuk kejahatan spionase, pengkhianatan, dan kejahatan lainnya yang dianggap berkaitan dengan keamanan (Arfi, 2005: 114-116).

Gerakan dan Pengaruh Politik Islam Sunni

Berjuang Melalui Partai Politik

Gerakan politik *Sunni* ini berevolusi atau terbangun karena kondisi krisis, misalnya hegemoni politik Kristen Maronit, keruntuhan negara, dan intervensi asing yang meluas (Shayya, 2009: 12). Diantara banyaknya partai politik yang berhaluan *Sunni* setidaknya penulis mengambil 2 partai politik yang terkenal dan paling berpengaruh, yaitu:

1. *Al-Jama'ah al-Islamiyah*

Terlepas dari penerimaan *Sunni* atas Pakta Nasional 1943, dekade pertama kemerdekaan Libanon diwarnai sejumlah gerakan keagamaan. *Sunni* secara terbuka menganut gagasan negara Islam, terutama Ibad al-Rahman (gerakan politik awal kemerdekaan) (Rabil: 31-32). Pembentukan *Ikhwanul Muslimin* cabang Lebanon, yang dikenal sebagai *al-Jama'ah al-Islamiyyah* (Asosiasi Islam) adalah partai politik Islam *Sunni* di Lebanon. *Jama'ah Islamiyah* didirikan pada tahun 1964 sebagai cabang *Ikhwanul Muslimin*

Lebanon. Partai ini didirikan oleh anggota muda 'Ibad al Rahman yakni Fathi Yakan. Asal-usul partai ini, kembali kepada upaya Gamal Abdel Nasser pada PAN-Arabisme di pertengahan tahun 1960-an. Partai ini mendukung gagasan membangun tatanan hukum di Lebanon yang didasarkan pada syariah Islam. Sebagai cabang lokal, cabang ini erat mengikuti doktrin Ikhwanul Muslimin. Fathi Yakan adalah penggerak ideologi utama partai ini yang merupakan cendekiawan dan pengkhotbah Islamis veteran dari Tripoli. Sebagai seorang murid dari pemikir Islam radikal Mesir Sayyid Qutb, ia menentang ideologi sekuler dan komunis dan ia menganggap Islam sebagai dasar dari tatanan sosiopolitik. Setelah perang Arab-Israel 1967, Fathi Yakan bergabung dengan Sa'eed Hawwa dari Ikhwanul Muslimin Suriah untuk mengadvokasi jihad melawan Barat dan Israel. Dia juga memimpin Jamaah Islamiyah selama perang sipil Lebanon dan bertempur di pihak koalisi kiri-Islam di Tripoli. Dengan cara ini, kelompok ini secara sah dapat dibingkai sebagai cabang Ikhwanul Muslimin di Libanon.

a. Ideologi dan Tujuan

Jama'ah Islamiyah dalam membangun tatanan Islam di Lebanon berdasarkan hukum *Syariah*. Sampai sekarang, Jamaah Islamiyah menunjukkan dalam pemahamannya sebagai Islam yang moderat dan tetap berkomitmen sejalan dengan Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Doktrin yang diikuti oleh Jama'ah Islamiyah bahwa kelompoknya adalah pendukung daripada hukum Allah. Sebagai hasil dari ini, pemahaman kelompok ini tentang Islam yang benar mengikuti atau sejalan dengan ide Sayyid Qutb dan pemikir lain dari Gerakan Islam (Abbas, 2008: 42).

b. Strategi

Dalam konteks revolusi Suriah, partai ini memberikan dukungannya melalui bantuan kemanusiaan, dukungan politik, dan sebagai informan semata-mata. Tidak ada pejuang atau senjata yang disediakan oleh partai ini, dan juga tidak terlibat dalam penyeberangan perbatasan atau penyelundupan dalam bentuk apa pun. Namun, al-Akhbar menuduh partai ini mengangkat senjata dan mengirim pasukan untuk berperang melawan rezim di Suriah. Telah dikatakan bahwa sikap Jama'ah Islamiyah bergeser dari mengutuk

penindasan di awal perselisihan, menjadi pihak yang ikut dalam konflik, sementara yang lainnya menyatakan bahwa tidak mungkin partai ini mengangkat senjata hanya karena Suriah.

Lingkungan masjid telah menjadi landasan utama untuk mobilisasi sejak ummat terdahulu, tidak hanya melalui khotbah Jumat, tetapi juga melalui pelajaran agama yang diberikan oleh beberapa Sheikh secara teratur kepada pengikutnya.

Di Lebanon, Jama'ah Islamiyah dikatakan merekrut pemuda melalui masjid, sekolah, klinik dan rumah sakit. Mantan pemimpin, Sheikh Faysal al-Mawlawi mengatakan bahwa mereka menganggap diri mereka mewakili sentimen rakyat, dan karenanya tidak mengadopsi mobilisasi organisasi apa pun. Mereka lebih mengandalkan dukungan masif rakyat yang terorganisir, tanpa harus bergabung dengan partai ini. Partai jama'ah islamiyah tahu bahwa pemuda pada umumnya adalah mereka yang aktif di lapangan. Di Lebanon, partai ini juga memiliki catatan kuat sebagai pendukung Palestina. Jama'ah Islamiyah secara domestik adalah sekutu utama hizbullah Lebanon dalam urusan atau yang berkaitan dengan permusuhan terhadap israel. Namun Secara regional, Jamaah Islamiyah memiliki hubungan dan kebijakan yang sejalan dengan Ikhwanul Muslimin, di Turki, Libya, dan yang paling pasti adalah Suriah dan Arab Saudi.

Selama perang saudara, kelompok ini memperoleh pendukung melalui pembentukan lembaga khusus yang mensponsori kegiatan Islam dan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pendidikan untuk pemuda, layanan publik, bantuan selama krisis dan menciptakan lembaga medis (klinik dan Rumah sakit). Dan juga mendirikan Asosiasi siswa Muslim, Yayasan Sosial dan Masyarakat Wanita, dan sejumlah badan amal lainnya di seluruh Lebanon (Abbas, 2008: 44).

Jama'ah Islamiyah, seperti kebanyakan partai politik pada waktu itu, membentuk kekuatan militer al-Mujahidin yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan wilayah Islam. Setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, kelompok ini bergabung dengan beberapa front Islam. Pada saat itu, sikap politiknya telah matang.. Partisipasinya dalam operasi pertempuran menghasilkan pada penarikan pasukan

Israel dari Lebanon Selatan pada Mei 2000, memungkinkan konflik Arab-Israel meningkat sebagai elemen penting dari ideologi politik kelompok ini sebagai hasil kerja lapangan. Sejak itu, kelompok ini secara konsisten menjadikan warga Israel sebagai musuh Negara dan warga Negara Lebanon (Haugbolle, 2010: 196).

Pada tahun 2003, kelompok ini memperkenalkan 'Piagam Pekerjaan Islam di Lebanon' dan menyerukan konferensi nasional yang dihadiri oleh lebih dari 206 anggota Asosiasi Islam Lebanon, dan mengeluarkan versi final Piagam tersebut. Yang terakhir diterima dengan baik, terutama oleh kalangan Kristen karena melihat masalah koeksistensi sektarian dan terorisme.

Selama perang 2006, beberapa anggota kelompok ini bertempur bersama Hizbullah di kota-kota dekat perbatasan Israel. Dalam operasi ini, kelompok ini tunduk kepada Hizbullah karena mereka tidak dapat menandingi kelompok Hizbullah secara militer (Shanahan, 2005: 123).

2. *Jabhat al-Amal al-Islami*

Jabhat al-Amal al-Islami dibentuk pada Agustus 2006 oleh Fathi Yakan, seorang veteran politik Islamis di Lebanon yang ikut mendirikan al-Jama'ah al-Islamiyyah. Fathi Yakan memutuskan hubungan dengan Jama'ah Islamiyah pada 2006 karena ketidaksetujuan Jama'ah Islamiyah beraliansi dengan Mustaqbal (Latif, 2008: 9). Fathi Yakan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Saad al-Hariri, Mustaqbal melayani kepentingan Barat di Lebanon bersekutu dengan Amerika Serikat dan poros rezim Arab "moderat" sebagai lawan dari kamp perlawanan Suriah, Iran, Hamas, dan Hizbullah, di mana Fathi Yakan adalah sekutu mereka. Fathi Yakan mengatakan bahwa partai Mustaqbal menjauh dari prinsip-prinsip pendirian partainya, yaitu perlawanan terhadap hegemoni AS dan menjaga identitas Arab Lebanon (Abbas, 2008: 48).

Jabhat al-Amal al-Islami, dalam pernyataan pendirinya, menggambarkan diri sebagai entitas independen yang diciptakan pada saat negara Islam mengalami serangan oleh AS-Zionis yang sangat brutal. Tujuan utama partai ini adalah solidaritas pada persatuan nasional dan persatuan Islam. Menjadi penengah atas perselisihan sektarian yang ada di Lebanon.

Jabhat al-Amal al-Islami, menurut para pendirinya, berupaya untuk menjadi mediator perang antara AS dan al-Qaeda di Lebanon. Gerakan ini menggunakan media untuk memperkenalkan diri kepada publik Lebanon. "Kami tidak ingin ini menjadi pertunjukan satu orang," kata salah satu tokoh muda gerakan tersebut, merujuk pada pengaruh Fathi Yakan pada *Jabhat al-Amal al-Islami* (Abbas, 2008: 59). Meskipun demikian, gerakan ini akan memanfaatkan profil tinggi Fathi Yakan sebagai veteran politik Islam. *Jabhat al-Amal al-Islami* masih dalam tahap awal, tetapi beberapa laporan yang bocor tentang perdebatan internal yang menunjukkan bahwa sudah ada konflik mengenai *Jabhat al-Amal al-Islami* harus berada diposisi mana dalam krisis politik saat ini. Kader *Jabhat al-Amal al-Islami* ingin menarik segmen-segmen Sunni yang berpikir Mustaqbal kehilangan arah di bawah kepemimpinan Saad Hariri. Dalam beberapa pernyataan, Fathi Yakan tampak berniat menciptakan front Islam yang melampaui sektarianisme. Fathi Yakan telah menjadi kritikus kuat pasukan Islam untuk mengungguli peran Hizbullah sebagai gerakan perlawanan. Meskipun sebagai pembelot, Fathi Yakan berbicara dengan baik tentang al-Jama'ah al-Islamiyyah dan memuji. Peran partai ini yang bergabung dengan pasukan perlawanan terhadap agresi Israel terhadap Lebanon. Dia mengakui bahwa gerakannya berusaha untuk memasukkan pasukan Islamis dan Jihadis.

Jabhat al-Amal al-Islami adalah organisasi payung yang menyatukan beberapa kelompok Islam, termasuk *Harakat al-Tawheed* dengan dua sayapnya, satu dipimpin oleh Sheikh Bilal Shaaban dan yang lainnya oleh Hashim Minqara (Abbas, 2008: 34).

Gerakan Ideologi Jihad

Ideologi jihadis berkembang di Libanon pada 1990-an di antaranya kelompok yang kehilangan haknya di tempat-tempat seperti kamp-kamp Palestina, distrik populer di Sidon, Beirut atau Tripoli, atau di daerah terpencil desa di Akkar atau Beqaa Barat. Di Palestina kamp Ayn al-Helweh, para pengkhotbah radikal melakukan resosialisasi pemuda miskin yang kehilangan profesinya di Lebanon pascaperang. Ayn al-Helweh menjadi surga bagi militan jihadis asing yang melarikan diri dari negara masing-masing, dan beberapa perwakilan al-Qaeda juga memantapkan diri di sana dari pertengahan 1990-an (Latif, 2008: 17).

Karena pentingnya demografis Sunni, Lebanon utara menjadi pusat komunal bagi militan Sunni dan ulama Sunni pada 1990-an, sebanding dengan pegunungan Lebanon yang dihuni Kristen Maronit dan Lebanon selatan yang ditempati mayoritas Syiah. Kota Tripoli di utara telah menjadi tempat perlawanan sunni bersenjata melawan pasukan Suriah pada 1980-an. Di pusat demografis Sunni ini yang secara historis terkait dengan kota-kota Suriah seperti Homs atau Aleppo pengkhotbah Salafi jihadi mendesak pengikut mereka untuk tetap terlepas dari politik, yang mereka anggap tidak sah. Sebaliknya, pemimpin sipil Sunni utama Lebanon, Rafiq Hariri, dilarang membangun konstituensi Sunni politik di Tripoli, yang dikelola secara ketat oleh badan intelijen Suriah.

Pada Desember 1999, bentrokan terjadi di Lebanon utara antara gerakan gerilyawan Salafi jihadi dan Tentara Lebanon menewaskan 35 orang. Ideologi resistansi resmi Lebanon pada waktu itu, yang diprakarsai oleh Hizbullah dan didukung oleh Presiden Lahoud, menyambut 'jihad baik' perlawanan terhadap pendudukan Israel. Militansi jihadis Sunni mengambil pandangan sebaliknya: bahwa Hizbullah mempunyai maksud tersembunyi yakni membajak front Lebanon selatan untuk keperluan komunal dan regionalnya sendiri, membuat para jihadis Sunni tidak punya pilihan lain selain membela umat melawan musuh-musuhnya, seperti yang terjadi di tempat-tempat seperti Bosnia, Chechnya atau Afghanistan (Arfi, 2005: 209).

Salah satu eksponen pertamanya di Lebanon adalah Syekh Sahlim al-Shahhāl (1922-2008) yang berasal dari Tripoli dan telah memeluk Wahhabisme di Madinah pada akhir Perang Dunia Kedua. Setelah kembali ke kota asalnya, ia mendirikan kelompok Shabab Muhammad, yang merupakan faksi Salafi pertama di Lebanon. Dia kemudian pergi mengelilingi ketiga ratus desa di distrik Akkar dan jalan-jalan di Tripoli, mengabarkan ideologi baru untuk menemukan banyak pengikut di antara para imam masjid lokal. Keberhasilan salafisme selama periode ini sebagian dapat dijelaskan oleh kekalahan Israel atas pasukan Arab pada tahun 1948 dan 1967 dan penurunan nasionalisme Arab setelah Perang Enam Hari. Berbagai kepribadian di Tripoli bergabung dengan organisasi ini (termasuk Syekh Sa'id Sha'bān, 1930-1998) dan kemudian kelompok ini mengubah nama menjadi *Jamā'at al-Muslimīn* (Komunitas Muslim) dan kemudian *Harakat al-Tawhid* (Gerakan Unifikasi Islam). Namun tidak pernah berhasil menjadi gerakan rakyat yang nyata (Abbas, 2008: 33).

Jika kita melihat lebih jauh ke masa lalu, Muhammad Rashid Ridā (1865-1935), penduduk asli Tripoli lainnya yang sangat menonjol. Jurnalnya *al-Manar* diterbitkan di Kairo dan memengaruhi syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914-1999) yang, dijuluki "Singa Sunnah" (Asad al-Sunnah), adalah salah satu bapak pendiri Salafisme kontemporer dan tinggal di Libanon untuk waktu yang lama. Sebutan "Salafi" menyebar dengan tepat berkat Albani, yang menggambarkan dirinya demikian dalam upayanya untuk membedakan dirinya dari aliran Sunni lainnya, apakah mereka Ikhwanul muslimin atau Sufi yang dianggap menyimpang.

Faktor yang menentukan dalam perkembangan Salafisme di Libanon adalah setelah dimulainya perang saudara pada tahun 1975, para imam masjid-masjid Sunni Libanon pergi ke Madinah dan Mekah, di Arab Saudi, mereka menjalani pelatihan. Di sana mereka menerima pendidikan yang lebih ketat daripada yang telah diberikan kepada mereka selama lebih dari seabad di Universitas al-Azhar di Mesir. Mereka diarahkan untuk menjadi imam ke sekolah-sekolah yang berbasis agama yang kemudian menyebarkan faham mereka (Rabil, 2014: 235).

Saat ini, ada berbagai kelompok di Libanon yang mengacu pada gerakan jihad. Salah satunya adalah Fath al-Islam. Fath al-Islam adalah kelompok jihadis yang dipimpin oleh Syekh militan Palestina Shakir al-'Absi. muncul pada 2007 dan mendirikan markasnya di Nahr al-Bared, kamp pengungsi Palestina. Sejarahnya terkait dengan serangan fatal yang diluncurkan pada 20 Mei 2007 terhadap beberapa posisi tentara Libanon dan elemen Sunni tertentu, khususnya. Insiden itu menandai titik balik dalam persepsi Libanon tentang Salafisme, yang mulai terlihat berbeda beberapa tahun sebelumnya karena kekerasannya di pegunungan atau distrik Dinniyeh, di sebelah timur Tripoli (Gate, 2007: 26).

Masih seideologi dengan Fath al-Islam adalah Usbat al-Ansar. Usbat al-Ansar, di sisi lain, adalah kelompok bersenjata jihadis Palestina, Salafi-Wahhabi, yang mungkin memiliki hubungan dengan al-Qaeda. Anggotanya terdiri dari orang-orang Libanon dan Palestina, tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam di Libanon (Rabil, 2014: 133-134).

Usbat al-Ansar adalah kelompok fundamentalis Sunni yang didirikan pada awal 1990-an, dengan basis operasi utama di kamp Palestina di kamp pengungsi Ain al-Hilwah dekat Sidon, yang mengaku menganut bentuk Islam Puritan dan memiliki misi

menggulingkan pemerintah sekuler yang mendominasi di Lebanon. telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kanada, Rusia, UEA, Inggris dan Amerika Serikat. Ada dalam daftar organisasi teroris AS untuk dugaan hubungan dengan Osama bin Laden al-Qaeda, dan pemerintah Amerika memutuskan untuk membekukan semua aset Usbat al-Ansar setelah serangan pada 11 September 2001. Kelompok ini dilaporkan menerima dana dari Abu Musab al-Zarqawi.

Usbat al-Ansar juga terhubung dengan kelompok-kelompok fundamentalis Usbat al-Nour, Jund Ash Sham, Majmu'at Dinniyeh dan Takfir wal Hijrah. Ahmed Abd al-Karim al-Saadi adalah pemimpin kelompok ini. Namun, sejak ia bersembunyi pada 1999, kelompok ini dipimpin oleh saudaranya, Abu Tarek al-Saadi. Usbat al-Ansar diperkirakan memiliki kurang dari 2000 anggota, kebanyakan dari Lebanon, dengan basis operasi utama di kamp pengungsi Ain al-Hilwah dekat Sidon di Lebanon selatan (Rabil, 2014: 140).

Usbat al-Ansar pertama kali muncul pada awal 1990-an. Pada pertengahan 1990-an, kelompok ini membunuh para pemimpin agama Lebanon dan membom klub malam, teater, dan toko minuman keras. Kelompok ini juga berkomplot melawan target diplomatik asing. Pada Oktober 2004, Mahir al-Sa'di, anggota Usbat al-Ansar, dijatuhi hukuman seumur hidup karena rencananya untuk membunuh Duta Besar AS untuk Lebanon David Satterfield. Usbat al-Ansar tidak memiliki ikatan formal dengan jaringan al-Qaeda, tetapi kelompok ini berbagi ideologi dengan al-Qaeda dan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap al-Qaeda di Irak. Anggota kelompok ini telah melakukan perjalanan ke Irak sejak 2005 untuk melawan Pasukan Koalisi. Usbat al-Ansar enggan melibatkan diri dalam operasi di Lebanon sebagian karena khawatir kehilangan tempat berlindung yang aman di kamp pengungsi Ain al-Hilwah (Saab, 2007: 831).

Ketiga adalah Takfir wal-Hijrah. Takfir wal-Hirah didirikan oleh Bassam Kanj (1965-2000) pada tahun 1997. Takfir wal-Hijrah tumbuh secara substansial sepanjang tahun 1990-an ketika para jihadis afghanistan kembali ke rumah mereka di Timur Tengah dan Afrika Utara dan menyebarkan doktrin mereka, membangun jaringan yang terdesentralisasi yang telah aktif di seluruh Aljazair, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan dan Sudan.

Pada 31 Desember 1999, di distrik Dinniyeh, Lebanon Utara, ratusan Takfiris

yang dipimpin oleh Bassam Kanj dari Lebanon mengorganisir serangan yang membunuh warga sipil dan bentrok dengan Tentara Lebanon, bentrokan terbesar sejak perang saudara. Pertempuran itu berlangsung selama seminggu sebelum ditundukkan. Setelah pertempuran, anggota Kelompok Takfir wal-Hijrah yang tidak terbunuh atau ditangkap melarikan diri ke Ain al-Hilweh. Menurut dokumen pengadilan dari proses peradilan terhadap anggota yang ditangkap, kelompok ini telah menerima dukungan keuangan dari rekanan Osama bin Laden melalui rekening bank di Beirut dan Lebanon utara. Pada tahun 2005, anggota kelompok dibebaskan oleh resolusi parlemen setelah pemilihan 2005 (Abbas, 2008: 63).

Gerakan Dakwah Khilafah

Sebelum rangkaian prosesi Tingkeban dimulai, perlu adanya berbagai persiapan oleh pihak yang akan mempunyai hajat. Persiapan ini berupa pembuatan sesaji dengan bantuan dari tetangga dan kerabat dekat. Sesaji ini dapat menyesuaikan kemampuan dari keluarga yang mempunyai hajat. Bagi keluarga yang dianggap mampu, maka sesajinya akan lebih banyak dan lebih lengkap. Bagi yang tidak mampu akan dibuatkan seadanya saja.

Hizbut Tahrir (selanjutnya disebut HT) Lebanon adalah contoh lain dari kelompok dengan struktur seperti partai. Organisasi elitis kecil ini telah mengungkapkan impian untuk menciptakan kekhalifahan Islam, tetapi berorientasi pada kegiatan berbasis partai pragmatis dan tidak memandang Negara Islam sebagai manifestasi sah dari kekhalifahan Islam yang diinginkan.

HT didirikan sebagai harakah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami/kufur agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara barat. HT juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yakni Khilafah Islamiyah di dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali.

HT memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur

sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan diba'iat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Muhammad serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad (Shayya, 2009; 48).

Di samping itu, aktivitas HT dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa-bangsa di dunia ini. HT juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.

Pada awalnya anggota HT terlibat dalam proses politik. Pengganti Nabhani yakni Abdul Qadeem Zallum, dan yang lainnya semuanya mencalonkan diri di Yordania antara tahun 1950 dan 1956. Namun setelah itu, mereka mundur, secara efektif bergerak di bawah tanah di seluruh dunia Arab.

Di Inggris, dan di tempat lain, kegiatan HT sering dilakukan secara diam-diam, meskipun tingkat kerahasiaan tergantung pada lingkungan setempat, termasuk sikap penegakan hukum dan layanan keamanan. Ini dibuktikan dengan praktik universal kelompok yang berkelanjutan menggunakan nama sampul untuk memesan tempat, mempublikasikan propaganda dan bahkan melakukan kegiatan politik.

Namun, perubahan besar terjadi baru-baru ini, ketika pemerintah Lebanon menyetujui pendaftaran HT sebagai partai politik. Sehingga memungkinkannya untuk muncul dari bayang-bayang setelah lima puluh tahun aktivitas yang dijalankan secara rahasia. Tentu saja ini mungkin merupakan cerminan dari kelemahan pemerintah Lebanon sendiri dan keinginan pemerintah Lebanon untuk mengimbangi pengaruh lain seperti Suriah dan Hizbullah, yang keduanya dianggap berbahaya oleh kepemimpinan HT (Shayya, 2009; 38).

Pada 19 Mei 2006, HT mengadakan konferensi pers di sebuah restoran di Beirut di mana juru bicara lokalnya, Dr Ayman al-Kadree, menyatakan bahwa HT akan diubah

menjadi sebuah partai politik, setelah pemerintah Libanon menangkap beberapa anggotanya terkait terorisme. Kepala kantor media HT menyatakan partainya akan berkonsentrasi pada panggilan ideologis dan politik (dakwah) menggunakan argumen dan persuasi dan mengadakan ceramah, konferensi filosofis dan politik, kampanye, membentuk dan mengirim delegasi politik, dan lain-lain (Gharib, 2014: 36).

SIMPULAN

Lebanon merdeka dari penjajahan Prancis dan Inggris tahun 26 November 1941, namun benar-benar merdeka pada tahun 1943 setelah Prancis menyepakati Pakta Nasional. Jauh sebelumnya, pemimpin pertama dari Dinasti Ma'ani, dibawah sub-divisi otonom dari Dinasti Ustmani, Fakhr-ad-Din II (wafat 1635M) bercita-cita memerdekakan Lebanon. Namun cita-cita ini urung diperoleh. Baru terwujud setelah Dinasti Ustmani kalah perang dari Prancis dan Inggris. Sejak munculnya negara pasca kehancuran Dinasti Utsmani, kebijakan nasional sebagian besar ditentukan oleh kelompok tradisional daerah dan pemimpin sektarian yang biasa disebut sistem politik konfessional.

Penduduk Lebanon terdiri dari beragam etnis dan agama yang diantaranya adalah etnis Arab dan Armenia; agama Islam (Syiah, Sunni, Druze) dan Kristen. Penduduk Lebanon terbagi atas tiga faksi besar, yakni kelompok Muslim Sunni, kelompok Muslim Syiah, dan kelompok Kristen Maronite, serta banyak faksi-faksi kecil dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun ketokohan orang per orang. Islam menjadi agama mayoritas di Lebanon, dengan kisaran populasi 59% dari keseluruhan populasi di Lebanon, selebihnya adalah agama Kristen dan agama-agama lainnya. Sunni menjadi sekte islam dengan populasi terbesar di atas syi'ah dan druze. Ini menjadikan Sunni memiliki kedudukan dan peluang berperan penting dalam perpolitikan di Lebanon.

Kenyataannya, sekte ini mengalami perpecahan di tubuhnya sendiri. Sunni memiliki banyak partai dan bermacam-macam kelompok militan. Setidaknya terbagi dalam tiga varian yang masing-masing bisa dikelompokkan 1. Partai resmi, 2. Gerakan Jihad, dan 3. Dakwah Khilafah. di partai resmi ada Jama'ah al-Islamiyah dan partai jabhat al-Amal al-Islami, sama-sama pendirinya Fathi Yakan seorang veteran Sunni di Lebanon. Sedangkan gerakan jihad, varian sunni militan misalnya Fath al-Islam, gerakan ini tidak segan-segan memerangi bahkan sesama muslim sunni itu sendiri.

Tidak kalah militan dari Fath al-Islam, Usbat al-Ansar. Kelompok ini terdiri dari pasukan jihadis Palestina dan Lebanon. Tujuan kelompok ini untuk mendirikan Negara Islam dengan Jalan kekerasan. Satu lagi kelompok Takfir wal-Hijrah. Kelompok ini lahir setelah usai peperangan di Afghanistan. Bertujuan untuk memerangi zionis Israel dan Amerika Serikat. poin terakhir adalah dakwah Khilafah, yakni Hizbut Tahrir Lebanon. Kelompok ini merupakan organisasi transnasional. Tujuan utama dari kelompok ini adalah mendirikan Khilafah Islam yang sesuai tuntunan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Perlu diketahui Hizbut Tahrir terlarang di semua Negara Arab kecuali di Negara Lebanon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Nivine H. *The Islamist Group in Tripoli: Its Reality, Effects and Connections*. Beirut: Lebanese American University Press, 2008.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Almond, Gabriel. and Sydney Verba. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five nations*. New York: Sage Publication, 1963.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa. *Jami' Tirmidzi, Kutubun al-Sittah*. April. 2000/Muharrom, 1421.
- Al-Uthaimin, Muhammad Saleh. *Apakah Yang Dimaksud Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Jakarta: Maktab Al-Muktasar Al-Islami, 1985.
- Amin, Ahmad. *Duhal-Islam. Juz III, cet. VII*. Qahirah: Maktabah an-Nahdatul-Misriyyah, tt.
- Arfii, Badredine. *International Change and the Stability of Multiethnic : States Yugoslavia, Lebanon, and Crises of Governance*. Bloomington: Indiana University Prees, 2005.
- Betts, Robert Brenton. *The Druze*. New Haven: Yale University Press, 1988.
- Dana, Nissim. *The Druze In The Middle East*. Brighton: Sussex Academic Press, 2003.
- El-Khazen, Farid. *The Comnlunal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact*. london: Oxonian Rewley Press Ltd, 1991.
- Firro, Kais M. *Nationalism and Confessionalism: Shi'is, Druzes and Alawis in Syria and Lebanon*. Boston: Brill, 2011.

- Gate, Tine. *Fatah al-Islam in Lebanon: Between Global and Local Jihad*. Norway: Norwegian Defence Research Establishmen, 2007.
- Gendzier, Irene L. *Notes from the Minefield: United States Intervention in Lebanon and the Middle East 1945–1958*. New York: Columbia University Press, 2003.
- Gharib, Muhammad Khalil. *Hizbut-Tahrir in Lebanon and the Arab World: History, Ideology and Praxis*. Beirut: Lebanese American University, 2014.
- Gonzalez, Nathan. *The Sunni-Shia Conflict: Understanding Sectarian Violence in The Middle East*. USA: Nortia Press, 1979.
- Haugbolle, Sune. *War and Memory in Lebanon*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Hitti, Philip K. *A Short History of Lebanon*. New York: ST. Martin's Press, 1965.
- Khalil, As'ad Abu. *Druze, Sunni and Shi'ite Political leadership in Present-Day Lebanon*. *Arab Studies Quarterly*, 7, IV, Fall 1985.
- _____. *Historical Dictionary of Lebanon*. Lanham: Scarecrow Press, 1998.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- _____. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Laffin, John. *The War of Desperation: Lebanon 1982-85*. London: Osprey Publishing, 1985.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Latif, Omayma Abdel. *Lebanon's Sunni Islamists - A Growing Force*. Washington: The Carnegie Middle East Center, 2008.
- Lenczowsky, George. *Timur Tengah di Tengah Kancanah Dunia*. trans. Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.
- Longva, Anh Nga. and Anne Sofie Roald. *Religious minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation*. Leiden/Boston: Brill, 2011.
- Najem, Tom. *The Collapse And Reconstruction of Lebanon*. United Kingdom: Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
- Nouruzzaman, Shiddiqi. *Syi'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Bidang Penerbit Pusat Latihan Penelitian Pengembangan Masyarakat, 1985.
- Obeid, Anis. *The Druze & Their Faith in Tawhid*. New York: Syracuse University

Press, 2006.

PARfiit, Joseph T. *Among the Druzes of Lebanon and Bashan*. London: Hunter & Longhurst, ltd. 1917.

Philipp, Thomas. and Birgit Schaebler. *The Syrian Land: Processes of Integration and Fragmentation*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998.

Quataert, Donald. *The Ottoman Empire 1700-1922*. New York: Cambridge University Press, 2005.

Rabil, Robert G. *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon*. New York: ST. Martin's Press, 2011.

_____. *Salafism in Lebanon: From Apoliticism to Transnational Jihadism*. Washington: Georgetown University Press, 2014.

Saab, Bilal Y. *Securing Lebanon from the Threat of Salafist Jihadism*. Washington: Taylor & Francis Group, 2007.

Shanahan, Rodger. *The Shi'a of Lebanon : Clans, Parties and Clerics*. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005.

Shayya, Kamal. *Islamic Movements in Lebanon*. Beirut: Masar Association, 2009.

Shihab, Quraish. *Sunnah-Syi'ah, Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sihbudi, M. Riza. *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*. Jakarta: Mizan, 2011.

Susanto, Nugroho Noto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1985.

Swayd, Samy. *Historical Dictionary of the Druzes*. Lanham : Scarecrow Press, 2006.

Taufiqurrahman. *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam Daras Sejarah Peradaban Islam*. Surabaya: Pustaka Islamika, 2003.

Artikel Internet

Thamrin, A. "Dahsyatnya Silaturahmi". <https://www.nu.or.id/opini/dahsyatnya-silaturahmi-YJokE>. 22 Juni 2022.

Gambill, Gary C. *Islamist Group in Lebanon*. Middle East Review of International Affairs, Vol. 11, No. 4, 2007. Diakses pada 18 Februari 2018, dari <http://www.rubincenter.org/2007/12/gambill-2007-12-04/>.

Hamamy, Ghalia, dkk. *Lebanon in Figures 2008*. central administration of statistic, 2012. Diakses pada 04 Februari 2018, dari <http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Lebanon-Figures-2008.pdf>

- Sands, Phil. *Syria's Druze Community: A Silent Minority In No Rush To Take Sides*. The National (UAE), February 22, 2012. Diakses pada 12 Februari 2019, dari <https://www.thenational.ae/world/mena/syria-s-druze-community-a-silent-minority-in-no-rush-to-take-sides-1.364426>
- Yacoub, Najwa. and Lara Badre. *Population & Housing in Lebanon*. central administration of statistic, 2012. Diakses pada 04 Februari 2018, dari http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=58&itemid=40.